



Framing Pemberitaan Media Online Detik.com terhadap Isu Ijazah

Joko Widodo

Muzemmil¹



*Korespondensi :

Email :
Muzemmilcadis@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 11 September 2025
Revisi : 30 November 2025
Diterima : 11 Desember 2025
Diterbitkan : 17 Desember 2025

Kata Kunci :

Framing Berita, Legitimasi
Prosedural, Media Daring,
Komunikasi Politik

Keyword :

News Framing, Procedural
Legitimacy, Online Media,
Political Communication

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembingkai (framing) berita yang dikonstruksi oleh Detik.com dalam pemberitaannya mengenai kontroversi keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis framing Robert N. Entman, yang berfokus pada empat elemen kunci: pendefinisian masalah (define problems), diagnosis penyebab (diagnose causes), penilaian moral (make moral judgments), dan rekomendasi penyelesaian (treatment recommendations). Unit analisis meliputi artikel berita yang diterbitkan oleh Detik.com antara tahun 2022 hingga 2025 terkait kontroversi ijazah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Detik.com secara dominan mengkonstruksi bingkai "legitimasi prosedural". bukannya berfokus pada kebenaran faktual ijazah itu sendiri, pemberitaan lebih menekankan pada proses hukum dan institusional yang sedang berjalan (laporan kepolisian, proses pengadilan, klarifikasi resmi) sebagai isu sentral. Bingkai ini secara halus menyampingkan klaim para penuduh dengan memposisikannya sebagai tuduhan tak berdasar yang harus divalidasi melalui jalur resmi, seraya pada saat yang sama memperkuat otoritas lembaga negara dan akademik. Pembingkai yang dilakukan Detik.com memiliki fungsi ganda: di satu sisi, detik.com menegaskan norma jurnalistik tentang objektivitas dengan meliput "drama" konflik, namun di sisi lain, ia pada akhirnya memperkuat status quo dengan memberikan hak istimewa kepada suara dan proses institusional di atas tuduhan substantif.

This research aims to analyze the news framing constructed by Detik.com in its coverage of the controversy over the authenticity of President Joko Widodo's university diploma. This study employs a qualitative approach using Robert N. Entman's framing analysis model, focusing on four key elements: defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and making treatment recommendations. The unit of analysis comprises news articles published by Detik.com between 2022 and 2025 related to the diploma controversy. The analysis reveals that Detik.com predominantly constructs a "procedural legitimacy" frame. Instead of focusing on the veracity of the diploma itself, the coverage emphasizes the ongoing legal and institutional processes (police reports, court proceedings, official clarifications) as the central issue. This frame subtly marginalizes the accusers' claims by positioning them as unsubstantiated allegations that must be validated through official channels, while simultaneously reinforcing the authority of state and academic institutions. Detik.com's framing serves a dual function: it upholds journalistic norms of objectivity by covering the "drama" of the conflict, yet it ultimately reinforces the status quo by privileging institutional voices and processes over substantive allegations.



PENDAHULUAN

Potret politik kontemporer di berbagai negara, termasuk Indonesia, diwarnai oleh fenomena yang dikenal sebagai era pasca—kebenaran (*post-truth*) (Hendrawan, Dohamid, and Afifuddin 2025). Era ini ditandai oleh situasi di mana daya tarik emosional dan keyakinan pribadi memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk opini publik dibandingkan fakta—fakta objektif. Dalam konteks ini, disinformasi dan kampanye delegitimasi telah menjadi instrumen politik yang lazim digunakan untuk menyerang lawan, merusak kredibilitas, dan memobilisasi sentimen publik (Lengga and Wijanarko 2023). Salah satu manifestasi paling jelas dari taktik ini adalah serangan terhadap atribut personal seorang pemimpin, termasuk latar belakang pendidikan dan kualifikasi akademiknya. Kontroversi mengenai keaslian ijazah sarjana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan studi kasus yang relevan dan signifikan dalam memahami dinamika ini. Isu ini bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah narasi yang terus—menerus didaur ulang pada momen—momen politik krusial. Tuduhan ini pertama kali mencuat secara signifikan menjelang pemilihan presiden 2019, mereda, dan kemudian kembali diangkat dengan intensitas yang lebih tinggi pada periode 2022 hingga 2025 (Green 2025). Persistensi isu ini menunjukkan bahwa tujuannya bukan sekadar mencari kebenaran faktual, melainkan berfungsi sebagai senjata politik untuk mengikis legitimasi dan kepercayaan publik terhadap figur Jokowi, bahkan setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Serangan semacam ini, yang menargetkan fondasi paling dasar dari riwayat hidup seseorang, dirancang untuk menanamkan keraguan yang persisten dan sulit untuk sepenuhnya dihilangkan, terlepas dari bantahan atau bukti yang disajikan.

Peran media massa dalam membentuk persepsi publik terhadap isu—isu politik telah menjadi subjek kajian yang luas dalam ilmu komunikasi. Salah satu kerangka teoretis yang paling berpengaruh dalam bidang ini adalah analisis framing. Framing, secara esensial, adalah proses seleksi dan penonjolan (Permadi et al. 2024). Media tidak sekadar menyajikan fakta secara pasif; sebaliknya, media secara aktif "membingkai" sebuah peristiwa dengan memilih aspek—aspek tertentu dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam sebuah teks berita (Zulham et al. 2024). Proses penonjolan ini dilakukan sedemikian rupa untuk mempromosikan definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan/atau rekomendasi penyelesaian tertentu atas isu yang diberitakan. Dengan demikian, analisis framing memungkinkan peneliti untuk membedah cara—cara atau ideologi media dalam merekonstruksi fakta dan menggiring interpretasi khalayak.

Berbagai model analisis framing telah dikembangkan oleh para ahli, seperti model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki, William A. Gamson, dan Murray Edelman (Purba and Sitorus 2023). Namun, untuk penelitian ini, model yang dikembangkan oleh Robert N. Entman dipilih karena sifatnya yang komprehensif dan terstruktur. Model Entman menyediakan empat perangkat analisis yang jelas

(Muzemmil 2024): *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (diagnosis penyebab), *make moral judgments* (penilaian moral), dan *treatment recommendations* (rekomendasi penyelesaian). Kerangka kerja ini sangat cocok untuk menganalisis pemberitaan isu yang kompleks dan sarat konflik seperti kontroversi ijazah Jokowi, karena memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan inti masalah, menunjuk pihak yang bertanggung jawab, memberikan penilaian moral kepada para aktor yang terlibat, dan menyarankan jalan keluar dari polemik tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa analisis framing Robert N. Entman banyak digunakan untuk mengkaji bagaimana media mengonstruksi realitas atas isu-isu kontroversial. Afandi (2024) menelaah pemingkakan konflik pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Kota Bogor dan menemukan bahwa media cenderung menonjolkan aspek konflik sosial dan ideologis (Afandi 2024). Khoerunisa (2024) mengkaji framing kebocoran data Pusat Data Nasional di DetikNews, CNN Indonesia, dan Tempo.co, yang memperlihatkan perbedaan media dalam mendefinisikan masalah serta aktor penyebabnya (Khoerunisa 2024). Reformansyah dan Widiarti (2023) meneliti framing kasus "IDI Kacung WHO" dan Jerinx, yang menunjukkan bagaimana media membentuk citra individu dan institusi melalui penilaian moral dan rekomendasi solusi (Reformansyah and Widiarti 2023). Anggoro et al. (2023) menyoroti peran media dalam membingkai keterlibatan perempuan pada Pilpres 2024, yang masih dipengaruhi bias gender (Anggoro, Puspitasari, and Som 2023). Pada isu kekerasan, Pamungkas (2023) menemukan bahwa Kompas.com menekankan aspek moral dan kronologis dalam pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak (Pamungkas 2023). Penelitian lain pada isu kebijakan dan konflik, seperti kenaikan BBM (Reza, Hanafi, and Azahar 2023), larangan mudik (Hidayat and Hamdan Prasetyo 2023), konflik Rusia–Ukraina (Darra Ananda and Purwanto Putra 2023), hingga figur Netanyahu (Hardilla and Zawawi 2024), menunjukkan bahwa framing media dipengaruhi kepentingan dan ideologi. Literatur ini menegaskan pentingnya analisis framing untuk mengkaji isu kontroversial yang menyangkut legitimasi tokoh publik, sehingga relevan dengan penelitian framing pemberitaan isu ijazah Jokowi di Detik.com.

Meskipun demikian artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada aplikasinya yang spesifik dan mendalam. Meskipun telah banyak studi yang menganalisis framing media terhadap pemilihan umum atau isu kebijakan, penelitian ini menawarkan analisis yang terfokus pada bagaimana sebuah portal berita daring (online) arus utama di Indonesia, yaitu Detik.com, membingkai sebuah kampanye delegitimasi personal yang berlarut–larut terhadap seorang pemimpin nasional. Studi ini mengisi celah dalam literatur dengan mengkaji persimpangan antara logika media, konflik politik, dan strategi disinformasi di era digital Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana media mengelola dan mengonstruksi narasi dari isu yang sangat terpolarisasi. Sebagai salah satu portal berita terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, Detik.com menghadapi tantangan jurnalistik yang signifikan dalam meliput isu ijazah Jokowi. Di satu sisi, media memiliki

kewajiban untuk melaporkan peristiwa yang menjadi perhatian publik, termasuk tuduhan yang dilayangkan oleh berbagai pihak. Di sisi lain, media juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menjadi platform bagi penyebaran disinformasi yang tidak terverifikasi. Oleh karena itu, permasalahan inti yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sebuah media arus utama seperti Detik.com menavigasi ketegangan antara melaporkan sebuah kontroversi yang sarat muatan politik dan berpotensi tidak memiliki dasar faktual, sambil tetap menjaga kredibilitas dan norma–norma jurnalistik. Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: "Bagaimana Detik.com membingkai kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo dalam pemberitaannya?"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Sugiono and Puji Lestari 2021). Pendekatan ini dipilih karena paling sesuai untuk melakukan analisis yang mendalam dan interpretatif terhadap teks berita (Permadi et al. 2024). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memfokuskan analisis pada satu fenomena spesifik dalam hal ini, pemberitaan Detik.com dan mengeksplorasinya secara komprehensif dalam konteks sosial dan politiknya (Muslyha et al. 2025). Sifat kualitatif dari penelitian ini menekankan pada pemahaman makna, narasi, dan strategi wacana yang terkandung dalam teks, bukan sekadar mengukur frekuensi kata atau topik (Muslyha et al. 2025).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah artikel–artikel berita yang diterbitkan oleh portal berita daring Detik.com. Periode waktu yang dipilih adalah antara tahun 2022 hingga 2025, yang merupakan periode di mana isu ijazah Jokowi kembali mengemuka dengan intensitas tinggi. Pemilihan artikel dilakukan secara purposif, dengan fokus pada berita–berita yang meliput peristiwa–peristiwa kunci dalam eskalasi kontroversi ini. Kriteria seleksi artikel didasarkan pada relevansinya dengan momen–momen penting berikut:

1. Gugatan perdata yang diajukan oleh Bambang Tri Mulyono dan proses hukum yang berujung pada vonis pidana terhadapnya .
2. Klarifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menegaskan keaslian ijazah Jokowi.
3. Laporan kepolisian yang dibuat oleh Joko Widodo terhadap pihak–pihak yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu.
4. Pernyataan, klaim, dan tindakan yang dilakukan oleh para penuduh, terutama figur publik seperti Roy Suryo dan Amien Rais.
5. Pemberitaan mengenai hasil survei opini publik yang mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap isu ijazah palsu.

Pemilihan artikel yang mencakup berbagai peristiwa kunci ini memastikan bahwa data yang dianalisis bersifat representatif dan mampu menangkap dinamika pembingkaihan yang dilakukan Detik.com secara menyeluruh.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis framing Robert N. Entman (Entman 1993). Model ini mengoperasionalkan analisis melalui empat langkah atau elemen yang saling terkait, yang diterapkan untuk membedah setiap artikel berita yang menjadi unit analisis. Operasionalisasi dari keempat elemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pendefinisian Masalah (Define Problems)*: Tahap ini mengidentifikasi bagaimana Detik.com mendefinisikan esensi dari peristiwa tersebut. Pertanyaan pemandunya adalah: Isu ijazah Jokowi ini disajikan sebagai masalah apa? Apakah sebagai sebuah "skandal pemalsuan dokumen negara," sebuah "kasus hukum pencemaran nama baik," sebuah "serangan politik terkoordinasi," atau sekadar "hoaks dan disinformasi"? Analisis dilakukan dengan memperhatikan judul, lead berita, dan pemilihan kata – kata kunci yang digunakan untuk melabeli peristiwa.
2. *Diagnosis Penyebab (Diagnose Causes)*: Tahap ini berfokus pada identifikasi siapa atau apa yang ditampilkan sebagai penyebab utama dari masalah yang telah didefinisikan. Pertanyaan pemandunya adalah: Siapa aktor atau kekuatan apa yang dianggap sebagai pemicu atau sumber dari kontroversi ini? Apakah penyebabnya adalah tindakan para penuduh, respons dari pihak Jokowi, atau adanya rivalitas politik yang lebih besar? Analisis dilakukan dengan mencermati siapa yang paling sering dikutip atau direferensikan sebagai agen kausal dalam narasi berita.
3. *Penilaian Moral (Make Moral Judgments)*: Tahap ini menganalisis evaluasi moral yang disematkan secara eksplisit maupun implisit dalam teks berita. Pertanyaan pemandunya adalah: Siapa yang diposisikan sebagai "korban," "pelaku kejahatan," "pahlawan," atau "otoritas yang sah" dalam narasi ini? Penilaian moral sering kali tidak dinyatakan secara langsung, tetapi dapat diidentifikasi melalui penggunaan kata sifat, penempatan kutipan narasumber, dan kontras yang dibangun antara para aktor yang terlibat.
4. *Rekomendasi Penyelesaian (Treatment Recommendation)*: Tahap terakhir ini mengidentifikasi solusi atau jalan keluar yang disarankan oleh berita untuk mengatasi masalah tersebut. Pertanyaan pemandunya adalah: Tindakan apa yang disajikan sebagai cara yang paling tepat untuk menyelesaikan kontroversi ini? Apakah solusinya adalah melalui proses peradilan, klarifikasi publik oleh Jokowi, rekonsiliasi politik, atau dengan mengabaikan isu tersebut? Rekomendasi ini bisa bersifat eksplisit atau implisit.

Dengan menerapkan keempat elemen ini secara sistematis pada setiap artikel, penelitian ini dapat merekonstruksi bingkai dominan yang dibangun oleh Detik.com dan memahami bagaimana bingkai tersebut mengarahkan pemahaman pembaca terhadap kontroversi ijazah Jokowi.

HASIL

Analisis Framing Pemberitaan Ijazah Jokowi pada Detik.com

Analisis mendalam terhadap pemberitaan Detik.com mengenai isu ijazah Jokowi mengungkapkan sebuah pola pembingkai yang konsisten dan terstruktur. Alih-alih terjebak dalam perdebatan faktual "asli atau palsu," Detik.com secara dominan membangun sebuah bingkai yang dapat diidentifikasi sebagai Legitimasi Prosedural. Bingkai ini menggeser fokus dari substansi tuduhan ke proses-proses formal yang mengelilinginya, seperti proses hukum, verifikasi institusional, dan respons kelembagaan. Temuan analisis disajikan secara sistematis dalam tabel berikut, yang kemudian akan diuraikan lebih lanjut.

Tabel 1. Analisis Framing detik.com

Elemen Framing	Deskripsi Frame Dominan	Indikator Tekstual
Pendefinisian Masalah	Kontroversi didefinisikan sebagai peristiwa hukum dan institusional, bukan sebagai skandal kebenaran faktual. Fokusnya adalah pada proses pelaporan, penyidikan, dan peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> – Judul: "Polda Metro Jaya Janji Tuntaskan Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi" – Judul: "Jokowi Tiba di Polda Metro Jaya, Laporkan Tuduhan Ijazah Palsu" – Isi berita: Fokus pada langkah-langkah hukum yang diambil oleh pihak Jokowi dan kepolisian.
Diagnosis Penyebab	Penyebab masalah diidentifikasi sebagai tindakan proaktif dari para penuduh. Merekalah yang menjadi pemicu dari seluruh rangkaian peristiwa yang diberitakan.	<ul style="list-style-type: none"> – Berita diawali dengan gugatan Bambang Tri Mulyono. – Berita dipicu oleh pernyataan atau aksi dari Roy Suryo dan Amien Rais yang mempertanyakan keaslian ijazah. – Narasi berjalan sebagai respons terhadap aksi para penuduh.
Penilaian Moral	Penilaian moral dilakukan dengan mengontraskan legitimasi institusi (UGM, Polri) dengan klaim personal (penuduh). Institusi diposisikan sebagai sumber kebenaran objektif, sementara penuduh sebagai sumber klaim subjektif.	<ul style="list-style-type: none"> – UGM dikutip sebagai lembaga otoritatif yang "memastikan" dan "menegaskan" keaslian ijazah. – Bareskrim Polri disebut telah melakukan "uji laboratoris" dan menyimpulkan ijazah "identik" dan "asli". – Klaim penuduh seringkali dilekatkan dengan kata "tudingan", "klaim", atau "pertanyaan". – Hasil survei LSI Denny JA yang menunjukkan ketidakpercayaan publik (74,6%) digunakan untuk memposisikan penuduh sebagai kelompok minoritas.

Rekomendasi Penyelesaian	Solusi yang direkomendasikan adalah mempercayakan dan mengikuti proses formal yang berlaku. Penyelesaian masalah berada di tangan lembaga hukum dan akademik, bukan melalui debat publik.	– Kutipan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya tentang komitmen "memproses tuntas" laporan. – Pemberitaan tentang dihentikannya kasus di Bareskrim setelah penyelidikan dianggap sebagai bentuk penyelesaian. – Implisit: Publik diimbau untuk menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan.
-----------------------------	---	--

Pendefinisian Masalah

Dalam membingkai isu ijazah Jokowi, Detik.com secara konsisten mendefinisikan masalah utama bukan pada pertanyaan substantif mengenai keaslian ijazah, melainkan pada serangkaian tindakan dan proses hukum serta institusional yang menyertainya. Berita – berita yang dianalisis tidak membuka ruang perdebatan mengenai bukti – bukti pemalsuan itu sendiri. Sebaliknya, narasi yang dibangun berpusat pada drama prosedural: siapa melapor siapa, bagaimana proses penyidikan berjalan, apa putusan pengadilan, dan bagaimana institusi resmi merespons.

Indikator paling jelas dari pendefinisian masalah ini terlihat pada pemilihan judul dan lead berita. Judul seperti "Jokowi Tiba di Polda Metro Jaya, Laporkan Tuduhan Ijazah Palsu" dan "Polda Metro Jaya Janji Tuntaskan Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi" secara eksplisit menempatkan tindakan hukum (melapor) dan proses kelembagaan (penyidikan oleh Polda) sebagai inti dari peristiwa. Demikian pula, ketika meliput akhir dari gugatan yang dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono, fokusnya adalah pada hasil peradilan: "Bambang Tri Juga Divonis Tahun Bui Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi". Dengan cara ini, Detik.com membingkai kontroversi ini sebagai sebuah kasus yang harus diselesaikan di dalam arena hukum, bukan di arena opini publik. Masalahnya bukanlah "apakah ijazah itu palsu?", melainkan "bagaimana sistem hukum merespons tuduhan tersebut?".

Diagnosis Penyebab

Dalam bingkai "Legitimasi Prosedural", penyebab atau pemicu dari seluruh kontroversi ini secara konsisten diatribusikan kepada tindakan para aktor penuduh. Narasi berita hampir selalu dimulai atau digerakkan oleh sebuah aksi yang dilakukan oleh pihak – pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Mereka adalah agen kausal yang memulai siklus pemberitaan.

Gelombang pemberitaan pada akhir 2022 dipicu oleh gugatan perdata yang didaftarkan oleh Bambang Tri Mulyono di PN Jakarta Pusat. Tindakan inilah yang menjadi "penyebab" dari "akibat" berupa respons dari UGM, proses hukum, hingga akhirnya vonis terhadap Bambang Tri sendiri. Pola yang sama terulang pada tahun 2025. Pemberitaan kembali intensif setelah figur – figur publik seperti Amien Rais dan Roy Suryo secara aktif menyuarakan keraguan mereka, baik dengan mendatangi UGM maupun

dengan menyerahkan analisis tandingan ke Bareskrim. Detik.com memposisikan tindakan—tindakan ini sebagai pemicu berita. Dengan demikian, para penuduh dibingkai sebagai pihak yang "membuat masalah," yang kemudian memicu respons dari lembaga—lembaga negara untuk "menyelesaikan masalah."

Penilaian Moral

Penilaian moral dalam pemberitaan Detik.com tidak disampaikan secara terang—terangan, melainkan dibangun melalui kontras antara sumber informasi yang dianggap legitimate dan yang tidak. Terdapat pemisahan yang jelas antara suara institusi (UGM, Kepolisian) dan suara individu (para penuduh). Suara institusi disajikan sebagai sumber kebenaran yang objektif, final, dan berlandaskan pada prosedur formal. Ketika UGM memberikan klarifikasi, Detik.com menggunakan diksi yang kuat seperti "memastikan" dan "menegaskan" bahwa Jokowi adalah alumnus sah dan ijazahnya asli. Begitu pula dengan kesimpulan Bareskrim Polri, yang diberitakan telah melakukan "uji laboratoris" dan menemukan bahwa ijazah Jokowi "identik" dengan pembanding dan oleh karena itu "asli". Pernyataan—pernyataan ini dibingkai sebagai fakta institusional. Sebaliknya, pernyataan dari pihak penuduh secara konsisten dilabeli dengan istilah yang menyiratkan subjektivitas dan kurangnya pembuktian, seperti "tudingan," "klaim," "dugaan," atau "mempertanyakan." Roy Suryo, misalnya, diberitakan "menyerahkan analisis" versinya, yang secara implisit diposisikan sebagai tandingan dari analisis resmi Labfor Polri.

Penilaian moral yang paling signifikan muncul dalam pemberitaan hasil survei LSI Denny JA . Dengan menonjolkan temuan bahwa 74,6% publik tidak percaya pada isu ijazah palsu, Detik.com secara efektif membingkai para penuduh sebagai kelompok yang berada di luar konsensus mayoritas. Hal ini secara tidak langsung memberikan penilaian moral bahwa posisi mereka tidak hanya bertentangan dengan lembaga resmi, tetapi juga dengan opini publik secara luas, memperkuat citra mereka sebagai kelompok pinggiran (fringe).

Rekomendasi Penyelesaian

Sebagai konsekuensi logis dari elemen—elemen sebelumnya, rekomendasi penyelesaian yang diusung oleh pemberitaan Detik.com adalah kepercayaan penuh pada mekanisme dan proses formal yang ada. Jalan keluar dari polemik ini, menurut bingkai yang dibangun, adalah melalui jalur hukum dan verifikasi institusional, bukan melalui pembuktian di ruang publik.

Rekomendasi ini tersirat kuat dalam penekanan berita pada komitmen Polda Metro Jaya untuk "menuntaskan kasus". Kalimat ini menyiratkan bahwa penyelesaian yang benar akan datang dari hasil kerja penyidik. Demikian pula, ketika Bareskrim menghentikan penyelidikan dengan kesimpulan bahwa tidak ditemukan tindak pidana, hal ini disajikan sebagai sebuah bentuk penutupan kasus. Tidak ada ruang dalam pemberitaan yang menyarankan solusi alternatif, seperti misalnya, desakan agar Jokowi secara pribadi

menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Pesan yang disampaikan jelas: biarkan sistem bekerja, dan percayakan hasilnya pada lembaga—lembaga yang berwenang. Bingkai ini secara efektif mendelegitimasi tuntutan—tuntutan di luar jalur formal dan memperkuat narasi bahwa kebenaran akan ditemukan melalui prosedur yang sah.

Legitimasi Prosedural Pada Pemberitaan Isu Ijazah Jokowi

Temuan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya menunjukkan adanya sebuah strategi pembingkaihan yang konsisten oleh Detik.com. Dengan mensintesis keempat elemen analisis Entman pendefinisian masalah sebagai proses hukum, diagnosis penyebab pada tindakan penuduh, penilaian moral yang mengunggulkan institusi, dan rekomendasi penyelesaian melalui jalur formal terbentuklah sebuah bingkai dominan yang disebut "Legitimasi Prosedural". Pembahasan ini akan menginterpretasikan makna dan implikasi dari penggunaan bingkai tersebut, baik dari perspektif praktik jurnalistik maupun komunikasi politik (Akmal, Usman, and Qamaruzzaman 2023).

1. Dominasi Frame "Legitimasi Prosedural"

Bingkai "Legitimasi Prosedural" adalah sebuah konstruksi naratif di mana validitas sebuah klaim atau kebenaran sebuah isu tidak ditentukan oleh bukti substantif yang diperdebatkan di ruang publik, melainkan oleh kepatuhannya terhadap prosedur—prosedur formal yang dijalankan oleh lembaga—lembaga yang diakui sah oleh negara. Dalam konteks isu ijazah Jokowi, Detik.com tidak bertanya "apakah ijazah ini asli?", melainkan "apakah tuduhan ini diproses sesuai hukum dan apakah lembaga berwenang telah memberikan pernyataan?". Bingkai ini memungkinkan Detik.com untuk mencapai beberapa tujuan secara simultan. Pertama, ia memungkinkan media untuk melaporkan sebuah kontroversi yang memiliki daya tarik tinggi bagi pembaca tanpa harus mengambil posisi tegas terhadap kebenaran klaim yang mendasarinya. Kedua, dengan berfokus pada proses, media dapat menampilkan diri sebagai peliput yang objektif dan netral, hanya melaporkan "apa yang terjadi" dalam proses hukum dan kelembagaan. Ketiga, dan yang paling penting, bingkai ini secara inheren memperkuat otoritas dan kredibilitas lembaga—lembaga negara (seperti Kepolisian dan UGM) sebagai penentu akhir dari "kebenaran" (Akmal, Usman, and Qamaruzzaman 2023).

2. Objektivitas Jurnalistik dan Penguatan Status Quo

Pada pandangan pertama, strategi pembingkaihan yang dilakukan Detik.com tampak selaras dengan prinsip jurnalisme objektif yang mengedepankan keseimbangan (balance) dengan memberikan ruang bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Detik.com memang memberitakan klaim dari para penuduh seperti Roy Suryo dan Amien Rais, sekaligus meliput bantahan dari pihak Jokowi dan klarifikasi dari UGM. Namun, analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa keseimbangan ini bersifat semu. Bingkai "Legitimasi Prosedural" secara struktural tidak memberikan bobot yang sama pada kedua belah pihak. Suara para penuduh dibingkai sebagai sumber "konflik" dan "klaim," sementara suara institusi dibingkai sebagai sumber

"fakta" dan "resolusi." Ketika UGM mengeluarkan pernyataan, itu dilaporkan sebagai klarifikasi final dari lembaga akademik yang berwenang. Ketika Bareskrim menyimpulkan ijazahnya asli, itu dilaporkan sebagai hasil dari penyelidikan forensik yang ilmiah. Sebaliknya, ketika Roy Suryo mengajukan analisisnya, itu dilaporkan sebagai tindakan personal yang menantang otoritas resmi (Luqman 2025).

Dengan demikian, meskipun secara permukaan tampak netral, bingkai ini secara halus dan efektif bekerja untuk memperkuat status quo. Ia tidak perlu secara eksplisit menyatakan bahwa tuduhan itu salah. Cukup dengan memfokuskan narasi pada proses pembuktian melalui jalur resmi sebuah proses di mana institusi negara memiliki keunggulan sumber daya dan legitimasi bingkai ini secara inheren memarginalkan narasi tandingan. Hasil akhirnya adalah penguatan kepercayaan publik terhadap institusi yang ada dan pendelegitimasi klaim—klaim yang datang dari luar struktur kekuasaan formal. Media, dalam hal ini, berfungsi sebagai agen peneguh legitimasi institusional, terlepas dari niat sadar para jurnalisnya.

3. Kontroversi sebagai Komoditas Politik dan Media

Salah satu aspek menarik dari bingkai "Legitimasi Prosedural" adalah kemampuannya untuk menjaga agar sebuah kontroversi tetap hidup sebagai komoditas berita yang menarik, meskipun substansi klaimnya telah berulang kali dibantah oleh pihak berwenang (Hasfi 2019). Jika bingkai yang digunakan adalah "fakta vs. hoaks," maka setelah adanya klarifikasi resmi dari UGM dan Polri, cerita tersebut seharusnya selesai. Namun, isu ini terus berlanjut selama bertahun—tahun. Hal ini dapat terjadi karena bingkai "Legitimasi Prosedural" mengubah fokus dari satu pertanyaan sentral (asli atau palsu) menjadi serangkaian episode drama yang tak berkesudahan. Setiap langkah prosedural menjadi sebuah berita baru yang layak diliput: pengajuan gugatan, sidang pertama, pencabutan gugatan, laporan ke polisi, pemanggilan saksi, gelar perkara, pernyataan pers, dan seterusnya. Setiap episode ini menghasilkan klik dan keterlibatan pembaca (engagement) yang tinggi, yang merupakan metrik penting bagi keberlangsungan media daring (Nofiard 2022).

Terciptalah sebuah hubungan simbiosis. Bagi para aktor politik seperti Roy Suryo atau Amien Rais, liputan media yang berkelanjutan memberikan mereka platform untuk tetap relevan dalam wacana publik. Bagi Detik.com, kontroversi ini menyediakan aliran konten yang stabil, dramatis, dan mudah diproduksi. Media tidak perlu lagi menginvestigasi kebenaran ijazah; cukup dengan melaporkan "babak terbaru" dari saga politik ini. Pemberitaan Detik.com mengenai survei LSI Denny JA, yang secara eksplisit menyebutkan adanya "motif politik" di balik isu ini, adalah sebuah ironi di mana media melaporkan proses politisasi yang mana ia sendiri menjadi bagian tak terpisahkan darinya.

4. Frame dengan Opini Publik

Efektivitas sebuah bingkai media sering kali bergantung pada resonansinya dengan skema kognitif atau keyakinan yang sudah ada di benak audiens. Dalam kasus ini, bingkai "Legitimasi Prosedural" yang dibangun Detik.com tampaknya memiliki resonansi yang kuat dengan persepsi publik Indonesia, sebagaimana tercermin dalam hasil survei LSI Denny JA (Hasfi 2019). Survei tersebut menemukan tiga alasan utama mengapa mayoritas publik (74,6%) tidak percaya pada isu ijazah palsu: (1) rekam jejak Jokowi yang dipercaya publik, (2) adanya klarifikasi dari lembaga resmi seperti UGM dan Kepolisian, dan (3) kesadaran publik akan adanya motif politik di balik isu tersebut. Ketiga alasan ini selaras secara sempurna dengan elemen – elemen yang ditonjolkan dalam bingkai Detik.com. Pemberitaan yang terus – menerus menekankan klarifikasi dari UGM dan proses hukum oleh Polri (alasan 2) serta meliput drama konflik antar – elite politik (yang mengindikasikan alasan 3) kemungkinan besar memperkuat keyakinan yang sudah ada di masyarakat (Ariani, Hutabarat, and Hangsing 2024).

Ini menunjukkan adanya sebuah lingkaran umpan balik (feedback loop). Detik.com membangun bingkai yang beresonansi dengan sentimen publik yang dominan, dan pada gilirannya, pemberitaan yang konsisten dengan bingkai tersebut semakin memperkuat sentimen publik tersebut. Media tidak menciptakan opini dari ruang hampa, melainkan mengamplifikasi dan melegitimasi pandangan mayoritas dengan cara membingkai peristiwa sedemikian rupa sehingga selaras dengan pandangan tersebut.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa Detik.com secara konsisten menggunakan bingkai legitimasi procedural pada pemberitaan yang membahas tentang permasalahan ijazah Jokowi. Dalam hal ini, media cenderung mengutamakan pada proses hukum, mekanisme kelembagaan dan respon institusi kenagaraan yang berkaitan dengan permasalahan ini dibanding dengan aspek substantif yang berkaitan langsung dengan aspek keaslian ijazah. Sehingga, isu ini diharapkan sebagai sebuah permasalahan yang harus diselesaikan melalui jalur formal hukum positif dan administrasi Negara, dibandingkan dengan pembahasan dan perdebatan melalui debat dan diskusi publik yang tidak berkesudahan. Narasipun lebih banyak menggambarkan actor penuduh sebagai pihak yang dianggap memicu konflik, sedangkan pihak Jokowi dan institusi Negara hadir sebagai pihak yang akan menyelesaikan permasalahan.

Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian – penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa media arus utama cenderung mengunggulkan suara intitusional dibanding suara pribadi, seperti Studi Afandi (2024) tentang konflik pendirian masjid, Reformansyah dan Widiarti (2023) terkait kasus Jerinx, serta Reza et al. (2023) mengenai kenaikan BBM, yang menggambarkan pola penguatan institusi dan otoritas Negara melalui framing prosedural dan legalistik. Dalam konteks ini, Detik.com menampilkan pihak UGM dan kepolisian sebagai kebenaran yang objektif dan institusional, sedangkan pihak yang

melaporkan direduksi menjadi pihak yang menuding. Temuan ini juga menegaskan bahwa argumen Entman, bahwa framing bukan hanya soal informasi yang diberitakan akan tetapi bagaimana makna dan moral yang diaplikasikan pada aktor tertentu. Akan tetapi, temuan ini penelitian ini juga memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bagaimana bingkai legitimasi prosedural tidak sekadar mencerminkan objektivitas jurnalistik, melainkan berpotensi memperkuat status quo. Meskipun detik.com secara formal memberikan ruang bagi kedua belah pihak yang berseteru, akan tetapi struktur narasi yang dibangun bersifat semu, karena pada akhirnya suara intitusi dan otoritas kenegaraan sebagai penentu final dari permasalahan, sedangkan suara kritis diposisikan sebagai pihak yang menganggu keteraturan. Temuan ini juga memperkuat kritik Luqman (2025) yang menyatkan bahwa jurnalisme procedural sangat sering digunakan sebagai upaya depolitisasi isu, dengan mengalihkan perhatian publik dari hal yang bersifat substansi menjadi hal yang lebih prosedural.

Penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi politik dan jurnalisme digital di Indonesia, khususnya bagaimana kemampuan media daring mampu memberikan pengaruh pada, legitimasi institusional, dan politik. Penelitian ini menemukan bahwa framing legitimasi prosedural memungkinkan isu dan kontriversi tetap hidup sebagai sebuah komoditas, tanpa adanya sebuah penyelesaian pada hal yang bersifat substansi. Pemberian eksposur pada setiap tahapan hukum menjadi cerita – cerita baru yang mampu mendatangkan trafik. Dalam hal ini, media tidak hanya menjadi pertarungan wacana, akan tetapi juga mampu mereproduksi dinamika permasalahan politik. Selain itu, pemberitaan – pemberitaan ini memperlihatkan adanya umpan balik antara media dan khalayak, seperti yang dibuktikan melalui survei LSI Denny JA. Hal ini juga memperkuat fakta bahwa media tidak hanya mampu membangun opini public akan tetapi juga mengamplifikasi dan melegitimasi sentimen yang ada pada masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang mendalam yang melibatkan perbandingan lintas media dengan karakter ideologis berbeda, atau mengombinasikan analisis framing dengan penerimaan masyarakat terhadap pemberitaan tersebut sehingga dimaknai oleh publik, dengan berbagai perspektif keilmuan yang kaya dan multi perspektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan Detik.com mengenai kontroversi ijazah Presiden Joko Widodo tidak dibingkai dalam kerangka dikotomis antara benar dan salah ataupun fakta dan hoaks. Sebaliknya, media ini mengonstruksi isu melalui bingkai "Legitimasi Prosedural", yang memposisikan permasalahan sebagai persoalan hukum dan institusional. Dalam bingkai tersebut, fokus diarahkan pada mekanisme penyelesaian formal melalui lembaga negara, sementara tindakan para penuduh dipandang sebagai pemicu polemik. Kredibilitas institusi, khususnya UGM dan Polri, secara implisit ditempatkan sebagai rujukan utama, sehingga klaim personal penuduh menjadi tersubordinasi. Dengan demikian, legitimasi institusional diperkuat, sedangkan ruang bagi narasi

alternatif menjadi terbatas. Kontribusi penelitian ini terletak pada kemampuannya mendemonstrasikan bagaimana media arus utama mengelola isu disinformasi yang sensitif secara politik. Melalui bingkai "Legitimasi Prosedural", Detik.com tetap menampilkan diri sebagai media yang objektif dengan menghadirkan beragam perspektif, namun secara struktural turut memperkuat narasi dominan negara. Hal ini menjadikan kontroversi faktual bertransformasi menjadi wacana politik yang berkelanjutan, yang pada gilirannya menguntungkan baik bagi aktor politik maupun bagi media itu sendiri dalam aspek atensi publik. Untuk penelitian selanjutnya, analisis komparatif terhadap media dengan orientasi politik yang berbeda diperlukan guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai variasi strategi pembingkai isu politik di Indonesia. Selain itu, studi resepsi audiens sangat penting dilakukan untuk menilai sejauh mana bingkai "Legitimasi Prosedural" ini diterima, ditafsirkan, atau bahkan dipertanyakan oleh masyarakat dengan latar belakang politik yang beragam. Dengan demikian, kajian lanjutan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara praktik pemberitaan media, konteks politik, dan pola penerimaan audiens dalam ekosistem informasi kontemporer.

REFERENSI

- Afandi, Yusuf Afandi. 2024. "Serupa Tapi Tidak Bersama: Pemberitaan Media Dalam Konflik Pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Di Kota Bogor." *KOMUNIDA: Media Komunikasi Dan Dakwah* 14 (2): 256–77. <https://doi.org/10.35905/komunida.v14i2.11008>.
- Akmal, Saiful, Abdul Rani Usman, and Qamaruzzaman Qamaruzzaman. 2023. "Political and Educational Messages in Serambi Indonesia: A Framing Analysis." *Jurnal ASPIKOM* 8 (2): 287. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i2.1270>.
- Anggoro, Ayub Dwi, Fingky Ayu Puspitasari, and Ahmad Puad Mat Som. 2023. "Robert Entman's Framing Analysis: Female Representation in 2024 Presidential Candidates on Republika.Com and Sindonews.Com." *Komunikator* 15 (2): 211–24. <https://doi.org/10.18196/jkm.19247>.
- Ariani, Prida, Tiurmaida Hutabarat, and Paokholun Hangsing. 2024. "Trends in Media Coverage in President Joko Widodo's Final Term." *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 8 (3): 491–505. <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i3.8902>.
- Darra Ananda, and Purwanto Putra. 2023. "Analisis Framing Model Robert N. Entman Tentang Konflik Rusia Dan Ukraina Pada Media Online The Washington Post Dan Xinhua News." *Communications* 5 (2): 511–35. <https://doi.org/10.21009/communications.5.2.5>.
- Entman, Robert M. 1993. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication* 43 (4): 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.
- Green, Berryl. 2025. "Analisis Kontroversi Ijazah Presiden Joko Widodo Dan Tanggung Jawab Institusional Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada." *Lintas Pena Media*. 2025.
- Hardilla, Hardilla, and Moh Zawawi. 2024. "A Comparison of Robert Entman's

- Framing of Netanyahu's Arrest News on Aljazeera Online News Media and CNN Arabic." *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 24 (2): 149–62. https://doi.org/10.17509/bs_jpbbsp.v24i2.75383.
- Hasfi, Nurul. 2019. "Komunikasi Politik Di Era Digital." *Politika: Jurnal Ilmu Politik; Vol 10, No 1 (2019)DO - 10.14710/Politika.10.1.2019.93-111*, April.
- Hendrawan, Dwiki Setya, Ahmad G Dohamid, and Mochammmad Afifuddin. 2025. "Strategi Menghadapi Disinformasi Dalam Konteks Perang Asimetris." *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4 (2): 1924–33. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i2.5286>.
- Hidayat, Rahmat, and Fajar Hamdan Prasetyo. 2023. "Analisis Framing Robert N Entman Pada Berita Larangan Mudik 2021 Di Media Detikcom Dan Kompas.Com." *Journal Communication Lens* 2 (2 SE–Articles): 1. <https://jurnal.uic.ac.id/Lens/article/view/174>.
- Khoerunisa, Dhina. 2024. "Analisis Framing Model Robert N. Etnman Pada Pemberitaan Kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) Di Media Online." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8 (3): 153–62. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i3.4193>.
- Lengga Wangge, Gregorius Loudowick, and Robertus Wijanarko. 2023. "Politik Identitas Era Post–Truth Di Indonesia Dalam Perspektif Language Games Ludwig Wittgenstein." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6 (2): 152–61. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.53628>.
- Luqman, Ria Fathya. 2025. "Framing Analysis on The Visual Cover of Political Magazines in Indonesia." *International Journal of Computer in Law & Political Science* 5 (2): 41–50.
- Muslyha, Amilia, Kheyene Molekandella Boer, Nurliah Nurliah, and Johantan Alfando W.S. 2025. "Analisis Framing Pemberitaan Dinasti Politik Jokowi Pada Pemilu Tahun 2024 Di Media Online Kompas.Com Dan Tempo.Co Periode Oktober 2023." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5 (3): 6239–52. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19802>.
- Muzemmil. 2024. "Polemik Nasab Habaib: Framing Channel YouTube Rhoma Irama." *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 5 (2): 369–82. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i2.1185>.
- Nofiard, Farid. 2022. "Komunikasi Politik Digital Di Indonesia." *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 10 (2): 31. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548>.
- Pamungkas, Ikbil. 2023. "Analisis Framing Robert N. Entman Terhadap Kasus Kronologi Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Pada Media Online Kompas.Com." *Jurnal Ilmiah Multimedia Dan Komunikasi* 8 (2). <https://doi.org/10.56873/jimk.v8i2.280>.
- Permadi, Didi, Inas Sany Muyassaroh, Hartuti Purnaweni, and Agus Setio Widodo. 2024. "Media Massa Dan Kontruksi Realitas (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan UU IKN Pada Media Online Tempo.Co Dan Mediaindonesia.Com)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 22 (1): 1. <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7754>.
- Purba, Herman, and Fitzgerald Kennedy Sitorus. 2023. "Truth, Post Truth, Dan Dinamikanya Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 10 (1): 1–16. <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.5001>.

- Reformansyah, Muhammad Alberian, and Pratiwi Wahyu Widiarti. 2023. "Analisis Framing Robert Entman Tentang Berita Kompas.Com Dan Detik.Com Tentang Kasus 'IDI Kacung WHO.'" *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5 (4). <https://doi.org/10.21831/lektur.v5i4.19180>.
- Reza, Faisal, Hanafi, and Yudi Kurnia Azahar. 2023. "Framing Analysis of News Coverage on the BBM Price Increase in Online Media." *Sinergi International Journal of Communication Sciences* 1 (3): 153–64. <https://doi.org/10.61194/ijcs.v1i3.261>.
- Sugiono, and Puji Lestari. 2021. *Metode Penelitian Komunikasi*. Edited by Sunarto. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Zulham, Arief Fahmi Lubis, Dedit Priyono, Fauzan, Sinta Julina, and Adzan Desar Deryansyah. 2024. "Analisis Framing Media Dalam Berita Kontroversial: Studi Kasus Pada Kasus—Kasus Politik Atau Sosial." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7 (3): 9118–26.